

ABSTRAK

Kewenangan pengadilan dalam perkara pemeliharaan anak akibat perceraian sejauh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 39 dan 41 a UU Perkawinan, serta 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) UU Peradilan Agama) belum memberikan kepastian kepada siapa anak korban perceraian akan diberikan hak pemeliharannya, kecuali jika orang tuanya mempersoalkannya dengan demikian pengadilan baru dapat memutuskannya. Ketentuan tersebut belum memberikan perlindungan yang layak kepada anak korban perceraian. Dalam hal ini tradisi hukum Islam memiliki kesempatan untuk menyumbangkan ide-ide dan prinsip-prinsip nilai yang terkandung di dalamnya untuk merekonstruksi konsep-konsep hukum modern yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan umat Islam, tetapi segenap warga bangsa bahkan seluruh umat manusia. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul: “Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Dalam Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Hukum Islam”.

Permasalahan yang hendak dijawab, ialah: bagaimana implementasi kewenangan pengadilan dalam perkara pemeliharaan anak akibat perceraian, bagaimana problematika kewenangan pengadilan dalam perkara pemeliharaan anak akibat perceraian, dan bagaimana rekonstruksi kewenangan pengadilan dalam perkara pemeliharaan anak akibat perceraian yang berbasis nilai keadilan hukum Islam?

Untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut, pada tataran *grand theory* digunakan teori keadilan hukum Islam dan teori negara hukum, pada tataran *middle theory* digunakan teori hukum kritis dan teori hukum progresif, sedangkan pada tataran *applied theory* digunakan teori *mashlahat* dan teori perlindungan hukum. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme, dengan pendekatan socio-legal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan preskriptif. Sumber data primer berupa data yang diperoleh dari praktik hukum empirik dilakukan dengan cara wawancara langsung dan mendalam kepada beberapa orang hakim dan panitera pengadilan agama, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumenter.

Temuan penelitian menunjukkan implementasi kewenangan pengadilan dalam perkara pemeliharaan anak masih bersifat ‘repressif’ (belum sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan anak) dan belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan hukum Islam. Berdasarkan teori eks-officio eksepsional kewenangan pengadilan – sebagai teori baru temuan penulis, maka secara ex officio hakim berwenang menjatuhkan keputusan soal pemeliharaan anak akibat perceraian sekaligus dan menjadi asessor perkara perceraian; Kewenangan tersebut bersifat eksepsional (luar biasa) sebagai pengecualian dari asas hakim pasif yang berlaku pada hukum acara perdata pada umumnya.

Kata kunci: kewenangan pengadilan, pemeliharaan anak akibat perceraian, keadilan hukum Islam.

ABSTRACT

Court authority in case of child care due to divorce which has been ruled in laws (article 39 and 41 a of Marriage Law; and article 66 paragraph 5 and article 86 paragraph 1 of Religious Justice Law) has not met certainty on to whom the child care will be given unless the parents question on that matter. The laws have not given any proper protection to the child. Islamic customary law has an opportunity to contribute ideas and value principles therein by reconstructing modern legal concepts for the benefit of Moslems, Indonesian citizens and all mankind. The title of this study is "Reconstruction of Court Authority in Case of Child Care Due to Divorce Based on Islamic Law Justice Values". Legal issues in this research are: how is the implementation of court authority in child-care due to divorce case? What are the challenging factors? And how is the reconstruction of juridical authority in the case of child-rearing divorce based on Islamic justice values?

To study and analyze the issues, it used the theory of justice of Islamic law and the theory of state law for the grand theory, the theory of critical law and progressive law theory for the middle range theory, and the theory of utility and the theory of legal protection for the applied theory. The paradigm used in this research is constructivism, with socio-legal approach. This study belongs to descriptive analytical and prescriptive research. Primary data sources collected from the practice of empirical law by direct and in-depth interviews with judges and court clerks of religion court, while secondary data obtained by literature and documentary studies. Research findings indicate that the implementation of court authority in childcare cases is still repressive (not really concerned with child's interest) and has not fully based on Islamic justice values yet. Based on the ex-officio theory of exceptions of court authority - as a new theory of authors' findings, the court has the authority to decide child care right as a result of divorce at same time and become the additional (asessor) in divorce case; such authority is exceptional as an exception to the principle of passive judges applicable to civil procedure law in general.

Key words: *court authority, child care due to divorce, Islamic legal justice.*